UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

LAPORAN KINERJA

KANTOR PENJAMINAN MUTU

TAHUN 2025



Gedung Prof. Dr. Satmoko Lantai 3
Kampus Sekaran Gunungpati
https://unnes.ac.id/kpm
bpm@mail.unnes.ac.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

KATA PENGANTAR iii

IKHTISAR EKSEKUTIF iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Gambaran Umum 1

B. Dasar Hukum 2

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi 2

D. Isu-isu Strategis/ Permasalahan 5

BAB II PERENCANAN KINERJA 7

A. Visi, Misi, Tujuan Strategis 7

B. Rencana Strategis 8

C. Rencana Kerja dan Anggaran 9

D. Perjanjian Kinerja 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15

A. Capaian Kinerja 15

B. Realisasi Anggaran 22

C. Kinerja Lain lain 24

BAB IV 28

Penutup 28

A. Ringkasan Kinerja 28

B. Permasalahan 29

C. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2026 29

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa,atas berkat dan rahmat-Nya Kantor Penjaminan Mutu (KPM) Universitas Negeri Semarang (UNNES) berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 dengan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Penjaminan Mutu tahun 2025. Kantor Penjaminan Mutu pada tahun 2025 menetapkan 3 sasaran dan 9 indikator kinerja. Secara umum Kantor Penjaminan Mutu telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya adalah masih belum tercapainya target jumlah prodi yang terakreditasi internasional. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Kantor Penjaminan Mutu pada tahun 2025. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Kantor Penjaminan Mutu pada tahun 2025.

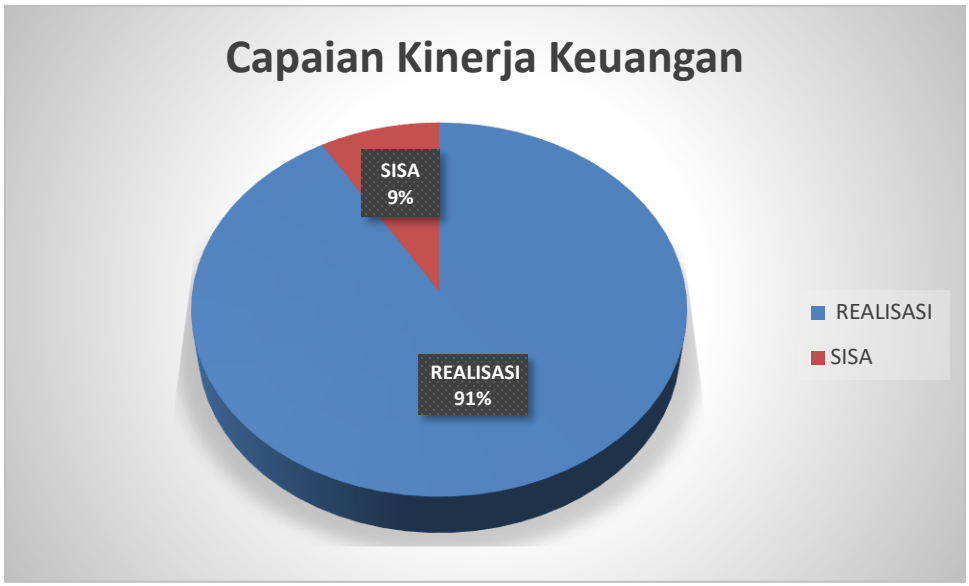
Semarang, Januari 2026
Ketua Kantor Penjaminan Mutu

Prof. Dr. Rudi Hartono, M.Pd.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Kantor Penjaminan Mutu tahun 2025 menyajikan tingkat pencapaian 3 sasaran dengan 9 indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III. Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut.

No	Kode Renstra	Nama Renstra	Target Renstra	Satuan	Capaian TW1	% Capaian TW1	Capaian TW2	% Capaian TW2	Capaian TW3	% Capaian TW2	Capaian TW4 sd 10 Desember	% Capaian TW4
1	IKU 3.2	Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	95,2	%	92,6	97,27%	97,64	102,56%	92,72	97,39%	96,97	101,86%
2	IKKU 3.2.2	Persentase mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project)	95,2	%	92,6	97,27%	97,64	102,56%	92,72	97,39%	96,97	101,86%
3	IKKS 4.3.1	Indeks kepuasan pengguna lulusan	4,6	indeks					3,69	80,22%	3,69	80,22%
4	IKKS 4.3.2	Indeks kepuasan lulusan	4,52	indeks					3,4	75,22%	3,4	75,22%
5	IKS 8.1	Jumlah Prodi yang Terakreditasi A dan/atau unggul	84	Prodi	83	98,81%	83	98,81%	84	100,00%	84	100,00%
6	IKKS 8.1.5	Jumlah Prodi yang mengimplementasikan kurikulum dual degreee	10	Prodi/ Unit	10	100,00%	10	100,00%	10	100,00%	10	100,00%
7	IKKS 8.1.6	Jumlah Prodi Internasional (yang punya kelas internasional)	29	Prodi/ Unit	22	75,86%	22	75,86%	22	75,86%	22	75,86%
8	IKU 3.3	Persentase Prodi S1/D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	41	%	28	68,29%	28	68,29%	32	78,05%	32	78,05%
9	IKKU 3.3.1	Jumlah Program Studi S1 dan D3 yang memiliki akreditasi internasional	29	Prodi	22	75,86%	22	75,86%	24	82,76%	24	82,76%



Selama tahun 2025, terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

1. Target Jumlah prodi internasional masih belum tercapai.
2. Jumlah prodi yang memiliki kelas internasional belum tercapai.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul, antara lain:

1. KPM telah melakukan kegiatan persiapan untuk 12 prodi yang akan mengikuti akreditasi internasional ACQUIN. Saat ini 12 prodi tersebut sedang menyusun dokumen dan diharapkan pada awal tahun 2026 sudah bisa mengikuti visitasi lapangan.
2. KPM mendorong Fakultas dan Prodi yang sudah memiliki akreditasi internasional untuk segera membuka kelas internasional. Terkait kendala yang dimiliki oleh prodi, yaitu kemampuan Bahasa Inggris dosen yang rendah, KPM sudah meminta prodi agar melakukan pelatihan Bahasa Inggris untuk para dosen.

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Kantor Penjaminan Mutu (KPM) merupakan transformasi dari Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNNES. BPM diresmikan melalui SK Rektor No 168/P/2009. Pada awalnya keberadaan Badan Penjaminan Mutu merupakan salah satu upaya Universitas Negeri Semarang dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu dan layanan, baik akademik dan non-akademik melalui kegiatan penjaminan mutu internal. Seiring dengan visi dan misi UNNES, kegiatan BPM juga ditujukan dan diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang sudah ditetapkan oleh Universitas Negeri Semarang.

Melalui Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang yang disahkan pada tanggal 6 April 2023, Badan Penjaminan Mutu (BPM) berganti nama menjadi Kantor Penjaminan Mutu (KPM) dengan unsur yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, Pusat, Administrasi Umum dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam rangka mendukung terlaksananya kegiatan penjaminan mutu yang optimal menjangkau hingga di lini Program Studi, maka melalui keputusan Rektor dibentuk gugus penjaminan mutu yang terdiri dari tim yang diusulkan oleh Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Lembaga sebagai panjang tangan KPM untuk mendampingi Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Lembaga dalam mendukung peningkatan mutu akademik.

Sejak dibentuk pada tahun 2009 hingga per bulan Januari 2024, Kantor Penjaminan Mutu UNNES telah menjalani 6 kali kepemimpinan dan saat ini dikepalai oleh Prof. Dr. Rudi Hartono, M.Pd. Beliau diangkat melalui Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/38/ UN37/HK/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kepala dan Sekretaris Kantor, Sekretaris Badan dan Satuan Pengawas Internal di Lingkungan Universitas Negeri. Semarang Periode Tahun 2023 – 2028. Saat ini Kantor Penjaminan Mutu terdiri dari 14 personil, yaitu 1 orang Kepala, 1 orang Sekretaris, 2 orang Kepala Pusat, 5 orang Staf Akademik, dan 5 orang Staf Administrasi Umum dan Keuangan.

Kantor Penjaminan Mutu bertanggungjawab langsung kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan kegiatan akademik berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan serta berpartisipasi aktif memberikan dukungan dalam rangka terwujudnya pencapaian visi Universitas Negeri Semarang.

B. Dasar Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar terbentuknya Kantor Penjaminan Mutu dan penyusunan laporan kinerja antara lain:

1. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 168/P/2009.
2. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tanggal 6 April 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tanggal 6 April 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang.

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 mengenai Unsur Pelaksana Penjaminan mutu Pasal 77, Kantor Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Pendidikan.

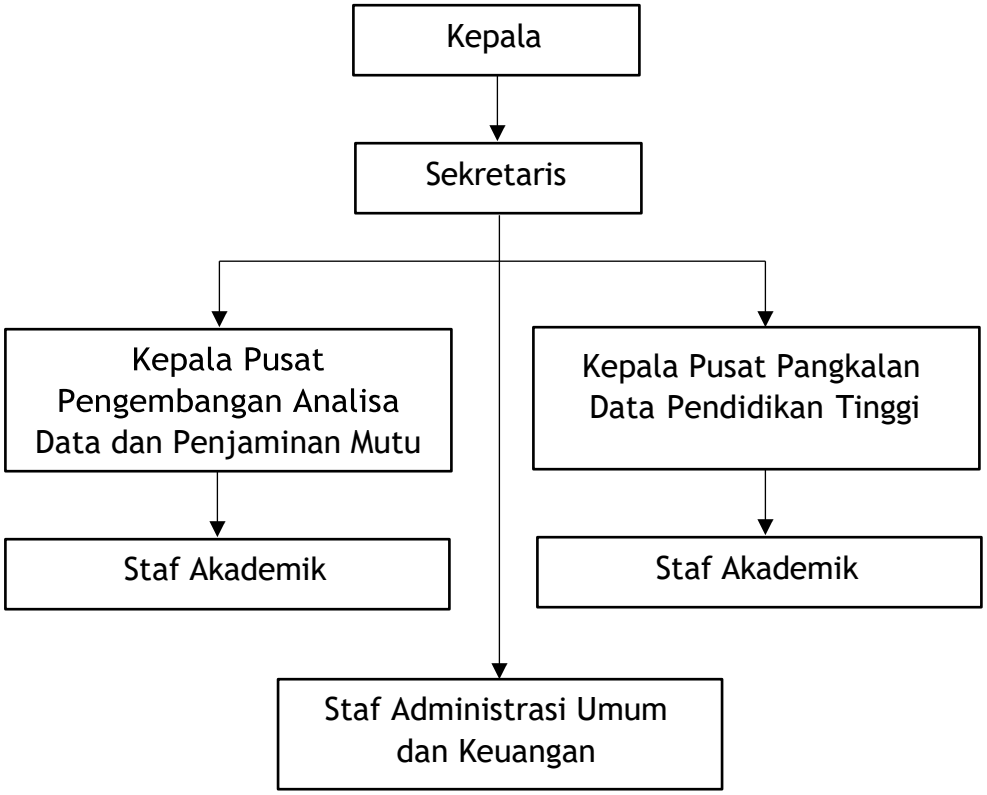
Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Kantor Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran yang mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan UNNES.

2. Pengawasan peningkatan dan pengembangan mutu pembelajaran.
3. Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.
4. Layanan informasi akademik dan kemahasiswaan lainnya bagi kementerian, universitas, fakultas, departemen, dan pihak lain yang memerlukan.
5. Bertanggungjawab pada penempatan homebase Dosen.
6. Melaksanakan koordinasi terkait dengan homebase Dosen dengan Subdirektorat SDM.
7. Bertanggungjawab atas pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
8. Pendampingan pengisian borang pemeringkatan, pelaksanaan evaluasi hasil pemeringkatan, pelaksanaan usulan perbaikan, peningkatan capaian pemeringkatan.
9. Pelaksanaan urusan administrasi pada KPM.
10. Pelaksanaan manajemen resiko di tingkat KPM.

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang yang disahkan pada tanggal 6 April 2023, struktur organisasi KPM terdiri dari:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Kepala Pusat Pengembangan Analisa Data dan Penjaminan Mutu
4. Kepala Pusat Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
5. Staf Administrasi Umum dan Keuangan



Gambar 1 – Struktur Organisasi Kantor Penjamina

D. Isu-isu Strategis/ Permasalahan

Dalam upaya mendukung tercapainya visi Universitas Negeri Semarang *Menjadi Universitas Bereputasi Dunia dan Pelopor Kecemerlangan Pendidikan yang Berwawasan Konservasi*, begitu banyak tantangan yang dihadapi dalam bidang penjaminan mutu.

Beberapa Permasalahan/ Isu Strategis yang dihadapi terbagi menjadi 5 bagian utama yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Penjaminan Mutu, yaitu sertifikasi internasional, akreditasi (nasional dan internasional), pemeringkatan (nasional dan internasional), kegiatan akademik dan perkuliahan, serta Prodi baru dan rasio Dosen dengan Mahasiswa.

1. Sertifikasi internasional

   UNNES telah berhasil melakukan sertifikasi internasional melalui lembaga sertifikasi internasional Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA) pada tahun 2019. Prodi Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Sarjana Biologi, Sarjana Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, serta Sarjana Ekonomi Pembangunan telah mendapat sertifikat internasional AUN- QA. Namun kebijakan pimpinan memutuskan untuk tidak melanjutkan kembali proses perpanjangan sertifikat tersebut yang berakhir pada tahun 2024 dikarenakan sertifikasi internasional kurang berdampak pada rating perguruan tinggi.

2. Akreditasi nasional dan internasional

   Persentase capaian akreditasi Prodi Unggul mulai beranjak naik seiring dengan antusiasme Prodi yang masih berstatus akreditasi A, Baik Sekali, dan B untuk mengajukan proses reakreditasi ke masing-masing lembaga akreditasi yang ditunjuk sesuai dengan bidang ilmu. Capaian akreditasi nasional Prodi unggul dan A per 31 Desember 2024 menunjukkan angka 66,67%. Persentase capaian meningkat dibandingkan capaian yang diperoleh pada akhir triwulan IV tahun 2024 sebesar 60%.

   Perlu dilakukan langkah antisipatif dengan mendorong Prodi-prodi untuk lebih memahami prosedur penilaian BAN-PT dan meningkatkan kualitas data yang dikirimkan ke PDDIKTI, serta mendorong Prodi-prodi yang mekanisme akreditasi dibawah Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk terus meningkatkan kualitas hasil penilaian akreditasi. Mengenai akreditasi internasional secara bertahap Prodi yang telah berstatus akreditasi A dan Baik Sekali akan diikutsertakan dalam daftar Prodi yang diajukan akreditasi internasional.

3. Pemeringkatan nasional dan internasional

   Capaian pemeringkatan UNNES baik nasional maupun internasional masih dirasa kurang optimal. Beberapa rujukan informasi yang masih terbatas mengenai indikator pemeringkatan nasional serta indikator penilaian dalam pemeringkatan internasional yang dianggap cukup berat untuk dipenuhi menjadi kendala dalam upaya meningkatkan peringkat UNNES. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan menyusun strategi dan mulai mempersiapkan beberapa rencana kegiatan yang relevan untuk memenuhi indikator penilaian pemeringkatan baik nasional maupun internasional serta meningkatkan mutu dan daya saing perguruan tinggi.

4. Kegiatan Akademik dan perkuliahan

   Kantor Penjaminan Mutu bertanggungjawab memonitor dan mengevaluasi jalannya kegiatan akademik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Temuan yang diperoleh diantaranya terdapat mata kuliah seperti KKN, PKL, PPL, komprehensif dan skripsi yang mana tidak terdapat Rencana Pembelajaran Semester (RPS), sehingga tidak dapat mencantumkan rincian *metode Case Method* dan *Team-based Project* sebagai bobot evaluasi. Selain itu dalam rangka memenuhi tuntutan teknologi pembelajaran, belum ada Prodi yang bersedia menyajikan perkuliahan dalam bentuk *Massive Open Online Courses (MOOCs)*. Dari uraian tersebut, maka perlu dilakukan koordinasi bersama unsur terkait untuk memenuhi tuntutan mata kuliah di luar kelas agar masuk dalam pelaporan RPS, serta mulai mempertimbangkan penyajian mata kuliah dalam bentuk MOOCs yang tentunya dengan memperhatikan efisiensi serta efektifitas kegiatan.

5. Prodi Baru dan Rasio Dosen Mahasiswa

   Transformasi UNNES menjadi Perguruan Tinggi Negeri Bada Hukum (PTN-BH) menuntut perguruan tinggi untuk memperluas layanan Pendidikan diantaranya dengan membuka Prodi baru. Namun kebijakan pemerintah dalam memasuki

   era revolusi industri 4.0, mengharuskan Prodi baru yang didirikan hendaknya berbasis revolusi industri, sehingga upaya yang dilakukan UNNES menanggapi hal tersebut adalah dengan mencantumkan kurikulum berbasis revolusi industri 4.0 pada dokumen pengajuan Prodi baru. Sisi lain yang terdampak atas pembukaan Prodi baru adalah dengan jumlah rasio Dosen dengan Mahasiswa yang meningkat, sehingga UNNES perlu mempertimbangkan untuk mengangkat Dosen melalui pengadaan Dosen Tetap maupun Dosen Tidak Tetap.

BAB II PERENCANAN KINERJA

A. Visi, Misi, Tujuan Strategis

Visi

Dalam mencapai tujuan, Kantor Penjaminan Mutu memiliki Visi dan Misi yang digunakan sebagai pedoman melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun Visi Kantor Penjaminan Mutu adalah.

Menjadi Kantor Penjaminan Mutu yang memelihara dan meningkatkan mutu akademik UNNES secara konsisten dan berkelanjutan menuju Universitas Bereputasi Dunia dan Pelopor Kecemerlangan Pendidikan yang Berwawasan Konservasi.

Misi

Sedangkan Misi Kantor Penjaminan Mutu adalah sebagai berikut.

1. Menetapkan dan memenuhi standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan
2. Mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI di UNNES secara berkelanjutan.
3. Membudayakan SPMI pada setiap unit kerja di UNNES.
4. Mengembangkan SPME Nasional Unggul dan SPME Internasional bereputasi.
5. Mengembangkan pangkalan data Pendidikan Tinggi bereputasi yang secata konsisten melakukan pelaporan secara transparan, jujur dan tepat waktu.

Tujuan Strategis

Tujuan dibentuknya Kantor Penjaminan Mutu adalah sebagai berikut.

1. Mewujudkan pendidikan dan pembelajaran yang cemerlang
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi ilmu kependidikan dan non kependidikan berkarakter, profesional, kompeten, dan kompetitif
3. Mewujudkan pranata pendidikan dan tata kelola yang efektif, kreatif, serta produktif.

B. Rencana Strategis

Rencana kinerja jangka menengah dituangkan dalam rencana strategis Kantor Penjaminan Mutu periode tahun 2023 – 2028. Adapun berikut target atau rencana kinerja jangka menengah Kantor Penjaminan Mutu.

Tabel 1 – Rencana Jangka Menengah Kantor Penjaminan Mutu

TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA/INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM UTAMA/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				SATUAN	THN/ KUM	TAHUN					
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tujuan 1 Mewujudkan pendidikan dan pembelajaran yang cemerlang											
SS1	**Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran**										
IKU 3.2	Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi			Persen	THN	92,69	95	95	95	95	95
Tujuan 2 Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi ilmu kependidikan dan non kependidikan berkarakter, profesional, kompeten, dan kompetitif											
SS4	**Meningkatnya Kualitas Akademik Berorientasi Link and Match**										
IKS 4.3	Kepuasan lulusan dan pengguna lulusan			Indeks	THN	3.875	3.975	3.975	4.025	4.025	4.025
	PU 20	Fasilitasi *tracer* alumni dan pengguna alumni									
		IKKS 4.3.1	Indeks kepuasan pengguna lulusan	Indeks	THN	4	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3
		IKKS 4.3.2	Indeks kepuasan lulusan	Indeks	THN	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75

Tujuan 4 Mewujudkan pranata pendidikan dan tata kelola yang efektif, kreatif, serta produktif;											
SS8	**Terwujudnya *World Class University***										
IKS 8.1	Jumlah Prodi yang Terakreditasi A dan/atau unggul			Prodi	KUM	72	80	84	88	90	92
	PU 39	Fasilitasi akreditasi nasional									
		IKKS 8.1.1	Jumlah Pembukaan Prodi Baru Sarjana	Prodi / Fakultas	THN	2	2	0	0	0	0
		IKKS 8.1.2	Jumlah Pembukaan Prodi Baru Profesi	Prodi / Fakultas	THN	N/A	1	0	0	0	0
		IKKS 8.1.3	Jumlah Pembukaan Prodi Baru Magister	Prodi / Fakultas	THN	4	7	0	0	0	0

		IKKS 8.1.4	Jumlah Pembukaan Prodi Baru Doktoral	Prodi / Fakultas	THN	2	1	0	0	0	0
		IKKS 8.1.5	Jumlah Prodi yang mengimplementasikan kurikulum dual degreee	Prodi / Fakultas	KUM	N/A	5	10	0	0	0
		IKKS 8.1.6	Jumlah Prodi Internasional	Prodi / Fakultas	KUM	N/A	7	0	0	0	0
IKU 3.3	Persentase Prodi S1/D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.			Persen	KUM	30	37	41	46	50	50
	PU 40	Fasilitasi Pengusulan Akreditasi dan Sertifikasi Internasional									
		IKKU 3.3.1	Jumlah Program Studi yang memiliki akreditasi internasional	Prodi	KUM	15	26	29	32	35	40
		IKKU 3.3.2	Jumlah Program Studi yang memiliki sertifikasi internasional	Prodi	KUM	4	0	0	0	0	0
SS9	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing**										
		IKKU 2.2.6	Nilai Rata-rata Kinerja Dosen (BKD) memenuhi	persentase	THN	84	85	86	87	88	89

C. Rencana Kerja dan Anggaran

Sebagai Pengguna anggaran Kantor Penjaminan Mutu, menyusun rencana kerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Berikut tren alokasi anggaran 2021 – 2025 Kantor Penjaminan Mutu.

Tabel 2 - Alokasi Anggaran KPM Tahun 2021 – 2024

Kode Satker	2021	2022	2023	2024
	231.961.000	231.961.000		
690645			150.000.000	216.000.000

Adapun rencana kerja dan anggaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3 - Alokasi Anggaran KPM Tahun 2025

KEMEN/LEMB (139) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
UNIT ORG (03) Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
UNIT KERJA (693449) Universitas Negeri Semarang
UNIT INTERNAL Kantor Penjamin Mutu
ALOKASI : 390,513,000

Kode	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	SD / KEG
II	Program Pendidikan Tinggi				390.513.000	
A	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi				390.513.000	
AC	Biaya Pengembangan				390.513.000	
02	Pengembangan Bidang Pendidikan				390.513.000	
i	Penataan Program Studi Kelas Reguler dan Khusus				390.513.000	
b	Monitoring dan Evaluasi Kelas Reguler dan Khusus				390.513.000	
001	*> Monev Pedoman Pembelajaran Kelas Reguler dan Khusus •(KPM)*	2	KEG		390.513.000	05
51020101	Beban Honorarium Non Pegawai				13.250.000	
	- Honor Narasumber Dalam Negeri (OJ)	10	OJ	1.325.000	13.250.000	0
51030102	Beban Barang Habis Pakai Kegiatan - Konsumsi				68.500.000	
	- Makan (buah)	2740	buah	25.000	68.500.000	0
51030105	Beban Barang Habis Pakai Kegiatan - Lainnya				18.000.000	
	- Bahan Habis Pakai Kegiatan Lainnya (buah)	18	buah	1.000.000	18.000.000	0
51030210	Beban Penggandaan dan percetakan				5.813.000	
	- Cetak Naskah (lembar)	5813	lembar	1.000	5.813.000	0
51030211	Beban Jasa Konsultan/ Profesi				100.000.000	
	- Jasa Konsultan (paket)	20	paket	5.000.000	100.000.000	0
51030215	Beban Jasa Lainnya				170.750.000	
	- Biaya Kontribusi (OK)	100	OK	1.707.500	170.750.000	0
51030402	Beban Yang Digunakan oleh Unit Kerja Lain di UNNES				5.800.000	
	- Cetak Naskah (lembar)	5800	lembar	1.000	5.800.000	0
51040102	Beban Perjalanan Dinas - Dalam Negeri				8.400.000	
	- Biaya Penginapan (OH)	3	OH	1.000.000	3.000.000	0
	- transport narasumber (OK)	5	OK	1.080.000	5.400.000	0
TOTAL					390.513.000	

D. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan perjanjian kinerja, Kantor Penjaminan Mutu menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai beikut :

Tabel 4 - Perjanjian Kinerja KPM Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Target PK 2025
1	Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran				
		IKU 3.2. Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	%	95.2	95.2
		IKKU 3.2.2. Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	%	95.2	95.2
2	Sasaran 8. Terwujudnya World Class University				
		IKS.8.1 Jumlah Prodi yang Terakreditasi A dan/atau unggul	Prodi	84	84
		IKKS 8.1.5. Jumlah Prodi yang mengimplementasikan kurikulum dual degreee	Prodi/ Unit	10	10
		IKKS 8.1.6. Jumlah Prodi Internasional (yang punya kelas internasional)	Prodi/ Unit	29	29
		IKU 3.3. Persentase Prodi S1/D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	41	41
		IKKU 3.3.1. Jumlah Program Studi S1 dan D3 yang memiliki akreditasi internasional	Prodi	29	29
3	Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Akademik Berorientasi Link and Match				
		IKS 4.3.kepuasan lulusan dan pengguna lulusan	Indeks	-	-
		IKKS 4.3.1. Indeks kepuasan pengguna lulusan	Indeks	4.6	4.6
		IKKS 4.3.2. Indeks kepuasan lulusan	Indeks	4.52	4.52

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Kantor Penjaminan Mutu menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2025. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun tahun sebelumnya, target rencara strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui revisi rencana

strategis.

Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Kantor Penjaminan Mutu tahun 2025.

TARGET KINERJA TAHUN 2025
Kantor Penjamin Mutu

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Alokasi Anggaran
Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran				
	IKU 3.2. Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	%	95.2	
	IKKU 3.2.2. Persentase mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project)	%	95.2	
Sasaran 8. Terwujudnya World Class University				
	IKS 8.1. Jumlah Prodi yang Terakreditasi A dan/atau unggul	Prodi	84	
	IKKS 8.1.5. Jumlah Prodi yang mengimplementasikan kurikulum dual degreee	Prodi/Unit	10	
	IKKS 8.1.6. Jumlah Prodi Internasional	Prodi/Unit	29	
	IKU 3.3. Persentase Prodi S1/D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	41	
	IKKU 3.3.1. Jumlah Program Studi yang memiliki akreditasi internasional	Prodi	29	
Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Akademik Berorientasi Link and Match				
	IKS 4.3. Kepuasan lulusan dan pengguna lulusan	indeks	-	
	IKKS 4.3.1. Indeks kepuasan pengguna lulusan	indeks	4.6	
	IKKS 4.3.2. Indeks kepuasan lulusan	indeks	4.52	

Page 3 of 4 | Printed by wiwik widayati on 24 Jan 2025 08:39:49

Kode		Sumber Pembiayaan	Alokasi
A.	**APBN**		**0**
B.	**Selain APBN**		**125.000.000**
	1.	Dana Pendidikan	125.000.000
C.	**Saldo Awal**		**0**
TOTAL			**125.000.000**

Kode		Program/Kegiatan	Alokasi
A.	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi		
	1	Biaya Pengembangan	125.000.000
TOTAL			**125.000.000**

Pihak Kedua

Prof. Dr. S Martono, M.Si.

30 Januari 2025
Pihak Pertama

Prof. Dr. Rudi Hartono, M. Pd.

Page 4 of 4 | Printed by wiwik widayati on 24 Jan 2025 08:39:49

Pada tahun 2025, Kantor Penjaminan Mutu melakukan penyesuaian / revisi anggaran melalui mekanisme yang telah di tentukan oleh Universitas pada bulan Februari, September, Oktober , dan November 2025. Hal tersebut dikarenakan adanya :

1. Pada bulan Februari ada pengurangan Pagu, dimana di awal tahun pagu KPM senilai 125.000.000 berubah menjadi 106.250.000,- .
2. Pada bulan September , KPM mengajukan penambahan pagu senilai 200.000.000 dimana

hal ini digunakan untuk Kegiatan Pendampingan Akreditasi Internasional ACQUIN.

3. Pada Bulan Oktober ada himbauan kepada seluruh unit kerja yang ada di UNNES untuk melakukan Realokasi Anggaran, dan KPM melakukan Realokasi anggaran senilai 65.737.000,- .
4. Pada bulan November KPM kembali mengajukan penambahan pagu senilai 5.000 EUR , dan pagu KPM di tambah senilai 150.000.000,- . penambahan pagu ini digunakan untuk Biaya Reconsideration fee akreditasi AQAS.

Penyesuaian alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja dari anggaran sebesar 125.000.000 menjadi 390.513.000,- .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2025 menetapkan 3 sasaran dengan dengan 9 indikator kinerja. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2025.

Tabel 5 - Pengukuran Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran					
		IKU 3.2. Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	%	95.2	96.97	101.86
		IKKU 3.2.2. Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	%	95.2	96.97	101.86
2	Sasaran 8. Terwujudnya World Class University					
		IKS.8.1 Jumlah Prodi yang Terakreditasi A dan/atau unggul	Prodi	84	84	100
		IKKS 8.1.5. Jumlah Prodi yang mengimplementasikan kurikulum dual degreee	Prodi/ Unit	10	10	100
		IKKS 8.1.6. Jumlah Prodi Internasional (yang punya kelas internasional)	Prodi/ Unit	29	22	75.86
		IKU 3.3. Persentase Prodi S1/D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	41	32	78.05
		IKKU 3.3.1. Jumlah Program Studi S1 dan D3 yang memiliki akreditasi internasional	Prodi	29	24	82.76
3	Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Akademik Berorientasi Link and Match					
		IKS 4.3.kepuasan lulusan dan pengguna lulusan	Indeks	-	-	
		IKKS 4.3.1. Indeks kepuasan pengguna lulusan	Indeks	4.6	3.69	80.22
		IKKS 4.3.2. Indeks kepuasan lulusan	Indeks	4.52	3.40	75.22

Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran

IKU 3.2. Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi
IKKU 3.2.2. Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi

1. Definisi operasional:
   persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.
2. Cara perhitungan Indikator Kinerja:
   Jumlah mata mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi dibagi dengan jumlah total mata kuliah dalam kurikulum.
3. Trend capaian kinerja:
   Data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil IKU 3.2 dari 95.2% pada tahun 2024 menjadi 96,97% pada tahun 2025.
4. Analisis Program dan kegiatan terkait:
   Dosen dihimbau untuk menambahkan mata kuliah yang memiliki RPS dengan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.
5. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan:
   Terjadi penambahan mata kuliah yang memiliki RPS dengan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.
6. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja tahun 2025:
   Beberapa mata kuliah seperti KKN, PKL, PPL, komprehensif dan skripsi yang mana tidak terdapat Rencana Pembelajaran Semester (RPS), sehingga tidak dapat mencantumkan rincian metode Case Method dan Team-based Project sebagai bobot evaluasi.
7. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan:
   Menghimbau Dosen untuk menambahkan mata kuliah yang memiliki RPS dengan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.
8. Analisis terkait strategi yang dilakukan:
   mengecek kembali mata kuliah yang tidak memiliki RPS dengan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi serta meminta dosen yang bersangkutan untuk menambahkan memiliki RPS dengan metode case method atau team-based project sebagai sebagian bobot evaluasi.
9. Analisis keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja tahun 2025:
   Sasaran 1 sudah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan dari sasaran ini disebabkan hampir semua dosen sudah mengikuti peraturan yang ditetapkan, yaitu memiliki RPS dengan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.

Sasaran 8. Terwujudnya World Class University

IKS.8.1 Jumlah Prodi yang Terakreditasi A dan/atau unggul

1. Definisi operasional:
   Jumlah Prodi yang Terakreditasi A dan/atau unggul adalah jumlah program studi di perguruan tinggi yang telah memperoleh status akreditasi A (berdasarkan sistem akreditasi BAN-PT lama) dan/atau Unggul (berdasarkan Instrumen Akreditasi Program Studi) yang masih berlaku secara sah, sebagai pengakuan resmi atas pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi yang sangat baik hingga unggul sesuai ketentuan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
2. Cara perhitungan Indikator Kinerja:
   Penjumlahan total Prodi D3/S1/S2/S3/profesi yang Terakreditasi A dan/atau unggul
3. Trend capaian kinerja:
   Jumlah prodi unggul dan A pada tahun 2024 sejumlah 78 prodi dan meningkat menjadi 84 prodi pada tahun 2025. Dengan demikian Capaian akreditasi nasional Prodi unggul dan A per 31 Desember 2025 menunjukkan angka sebesar 68%. Persentase capaian tahun 2025 meningkat dibandingkan capaian yang diperoleh pada akhir tahun 2024 sebesar 66,67%. jumlah 84 prodi telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Kenaikan persentase yang kecil ini disebabkan bertambahnya sejumlah prodi baru yang didirikan pada tahun 2025 Adapun beberapa prodi tidak berhasil naik peringkat setelah mengikuti re-akreditasi.
4. Analisis Program dan kegiatan terkait:
   KPM mendorong prodi- prodi yang akan melakukan re-akreditasi pada tahun 2025 untuk mengirimkan dokumen persyaratan akreditasi sesuai dengan BAN PT atau LAMnya masing-masing paling lambat tanggal 31 Desember 2024, sehingga akreditasi dapat berjalan dengan lancar
5. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan/kegagalan:
   Jumlah prodi unggul dan A pada tahun 2024 sejumlah 78 prodi dan meningkat menjadi 84 prodi pada tahun 2025. Terdapat 1 prodi yang tidak berhasil naik peringkat ke unggul pada tahun 2025. Namun demikian, jumlah 84 prodi telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Ketercapaian ini berkat kerja keras prodi yang mempersiapkan diri untuk menghadapi akreditasi dengan menyiapkan dokumen dengan baik.
6. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja tahun 2025:
   Tidak ada hambatan atau permasalahan yang berarti.
7. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan:
   KPM melakukan monitoring masa berlaku akreditasi secara berkala.
8. Analisis terkait strategi yang dilakukan:
   KPM melakukan monitoring masa berlaku akreditasi secara berkala untuk mencegah keterlambatan pengajuan dokumen re-akreditasi. Secara umum, hasil pemantauan dari KPM menunjukkan bahwa sabagian besar Fakultas sudah memiliki sistem yang baik dalam memonitor pelaksanaan persiapan re-akreditasi prodi. Sehingga KPM hanya tinggal memastikan bahwa dokumen akreditasi dapat dikirim tepat waktu.
9. Analisis keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja tahun 2025:
   Secara umum, sasaran 8 belum dapat menghasilkan hasil yang optimal, khususnya terkait dengan internasionalisasi UNNES. Masih terdapat hambatan dari prodi untuk bisa melakukan akreditasi internasional, yang khususnya disebabkan oleh repon yang lambat dari pihak ACQUIN. KPM sudah berusaha secara berkala menghubungi pihak ACQUIn, baik secara langsung maupun tidak langsung dan harapannya tahun depan pelaksanaan akreditasi internasional di UNNES dapat terlaksana.

IKKS 8.1.5. Jumlah Prodi yang mengimplementasikan kurikulum dual degree

1. Definisi operasional:
   Jumlah Prodi yang mengimplementasikan kurikulum dual degree adalah total program studi di suatu perguruan tinggi yang secara resmi dan aktif menyelenggarakan kurikulum pendidikan terintegrasi dengan mitra perguruan tinggi lain (dalam atau luar negeri), sehingga mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif dapat memperoleh dua ijazah atau gelar akademik dari dua institusi berbeda melalui satu skema pembelajaran yang telah disepakati bersama.
2. Cara perhitungan Indikator Kinerja:
   Penjumlahan total Prodi yang mengimplementasikan kurikulum dual degree
3. Trend capaian kinerja:
   Pada tahun 2025, Jumlah Prodi yang mengimplementasikan kurikulum dual degree tidak memiliki perubahan. Masih sama dengan tahun 2024. Target telah tercapai.
4. Analisis Program dan kegiatan terkait:
   Tidak terdapat kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kerjama kurikulum dual degree. Tugas ini sebagian dilakukan oleh KUI
5. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan/kegagalan:
   Prodi masih harus mencari partner luar negeri yang tepat dan mau diajak melakukan kurikulum dual degree.
6. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja tahun 2025:
   Prodi masih harus mencari partner luar negeri yang tepat dan mau diajak melakukan kurikulum dual degree.
7. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan:
   KPM mendorong prodi untuk melakukan pemetaan untuk mencari partner luar negeri yang tepat dan mau diajak melakukan kurikulum dual degree.
8. Analisis terkait strategi yang dilakukan:
   KPM secara berkala meminta Fakultas dan prodi untuk melakukan pemetaan untuk mencari partner luar negeri yang tepat dan mau diajak melakukan kurikulum dual degree.
9. Analisis keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja tahun 2025:
   Secara umum, sasaran 8 belum dapat menghasilkan hasil yang optimal, khususnya terkait dengan internasionalisasi UNNES. Masih terdapat hambatan dari prodi untuk bisa melakukan akreditasi internasional, yang khususnya disebabkan oleh repon yang lambat dari pihak ACQUIN. KPM sudah berusaha secara berkala menghubungi pihak ACQUIn, baik secara langsung maupun tidak langsung dan harapannya tahun depan pelaksanaan akreditasi internasional di UNNES dapat terlaksana.

IKKS 8.1.6. Jumlah Prodi Internasional (yang punya kelas internasional)

1. Definisi operasional:
   Jumlah Prodi Internasional (yang punya kelas internasional) adalah jumlah program studi di perguruan tinggi yang secara resmi menyelenggarakan kelas internasional, yaitu kelas dengan kurikulum, proses pembelajaran, dan tata kelola akademik berstandar internasional, yang ditandai antara lain dengan penggunaan bahasa asing (umumnya Bahasa Inggris) sebagai bahasa pengantar.
2. Cara perhitungan Indikator Kinerja:
   Penjumlahan total Prodi yang memiliki kelas internasional berdasarkan SK Rektor
3. Trend capaian kinerja:
   Pada tahun 2025, Jumlah Prodi yang memiliki kelas internasional tidak ada perubahan. Masih sama dengan tahun 2024
4. Analisis Program dan kegiatan terkait:
   KPM mendorong Fakultas dan Prodi yang sudah memiliki akreditasi internasional untuk segera membuka kelas internasional.
5. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan/kegagalan:

Terdapat kendala yang dimiliki oleh prodi, yaitu kemampuan Bahasa Inggris dosen yang rendah sehingga menyulitkan mendirikan kelas internasional.

6. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja tahun 2025:
   Terdapat kendala yang dimiliki oleh prodi, yaitu kemampuan Bahasa Inggris dosen yang rendah sehingga menyulitkan mendirikan kelas internasional.
7. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan:
   KPM mendorong Fakultas untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris dosen yang rendah.
8. Analisis terkait strategi yang dilakukan:
   KPM setiap kali menjelang tahun akademik baru menanyakan kesiapan Fakultas untuk membuka kelas internasional pada prodi-prodi yang memiliki akreditasi internasional.
9. Analisis keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja tahun 2025:
   Secara umum, sasaran 8 belum dapat menghasilkan hasil yang optimal, khususnya terkait dengan internasionalisasi UNNES. Masih terdapat hambatan dari prodi untuk bisa melakukan akreditasi internasional, yang khususnya disebabkan oleh repon yang lambat dari pihak ACQUIN. KPM sudah berusaha secara berkala menghubungi pihak ACQUIn, baik secara langsung maupun tidak langsung dan harapannya tahun depan pelaksanaan akreditasi internasional di UNNES dapat terlaksana.

IKU 3.3. Persentase Prodi S1/D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

1. Definisi operasional:
   Persentase Prodi S1/D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah adalah persentase program studi jenjang S1, D4, dan D3 di suatu perguruan tinggi yang telah memperoleh akreditasi atau sertifikat internasional dari lembaga akreditasi/sertifikasi luar negeri yang diakui oleh pemerintah Indonesia, dibandingkan dengan total seluruh program studi S1, D4, dan D3 yang aktif
2. Cara perhitungan Indikator Kinerja:
   Jumlah program studi jenjang S1, D4, dan D3 di suatu perguruan tinggi yang telah memperoleh akreditasi atau sertifikat internasional dari lembaga akreditasi/sertifikasi luar negeri yang diakui oleh pemerintah Indonesia, dibagikan dengan total seluruh program studi S1, D4, dan D3 yang aktif
3. Trend capaian kinerja:
   Kinerja pada tahun 2025 ini adalah sebesar 78.05%. Menurun dari kinerja pada tahun 2024 sebesar 93%. Hal ini terjadi dikarenakan 4 program studi yang memiliki sertifiksi internasional sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang. Sementara hanya terdapat 7 program studi yang mendapatkan akreditasi internasional baru pada tahun 2025.
4. Analisis Program dan kegiatan terkait:
   KPM melakukan pendampingan terhadap 12 program studi S1 untuk mempersiapkan diri mengikuti akreditasi internasional ACQUIN.
5. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan/kegagalan:
   Kerjasama dengan ACQUIN masih belum optimal, respon dari ACQUIN lambat sehingga menimbulkan ketidakpastian. Sampai akhir tahun 2025 kontrak kerjasama masih belum direspon oleh pihak ACQUIN.
6. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja tahun 2025:
   Kerjasama dengan ACQUIN masih belum optimal, respon dari ACQUIN lambat sehingga menimbulkan ketidakpastian. Sampai akhir tahun 2025 kontrak kerjasama masih belum direspon oleh pihak ACQUIN.
7. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan:
   KPM secara berkala menghubungi pihak ACQUIN melalui email menanyakan kontrak pelaksanaan akreditasi internasional.
8. Analisis terkait strategi yang dilakukan:
   Secara berkala menghubungi pihak ACQUIN melalui email menanyakan kontrak pelaksanaan akreditasi internasional serta meminta bantuan konsultas UNNES untuk membantu menghubungi pohak ACQUIN.

9. Analisis keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja tahun 2025:
   Secara umum, sasaran 8 belum dapat menghasilkan hasil yang optimal, khususnya terkait dengan internasionalisasi UNNES. Masih terdapat hambatan dari prodi untuk bisa melakukan akreditasi internasional, yang khususnya disebabkan oleh repon yang lambat dari pihak ACQUIN. KPM sudah berusaha secara berkala menghubungi pihak ACQUIn, baik secara langsung maupun tidak langsung dan harapannya tahun depan pelaksanaan akreditasi internasional di UNNES dapat terlaksana.

IKKU 3.3.1. Jumlah Program Studi S1 dan D3 yang memiliki akreditasi internasional

1. Definisi operasional:
   program studi jenjang S1, D4, dan D3 di suatu perguruan tinggi yang telah memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi luar negeri yang diakui oleh pemerintah Indonesia, dibandingkan dengan total seluruh program studi S1, D4, dan D3 yang aktif.
2. Cara perhitungan Indikator Kinerja:
   Penjumlahan total Prodi S1 dan D3 yang memiliki akreditasi internasional
3. Trend capaian kinerja:
   Jumlah Program Studi S1 dan D3 pada tahun 2025 yang memiliki akreditasi internasional sebanyak 24 program studi, walaupun tidak mencapai target yang sudah ditetapkan, jumlah prodi yang memiliki akreditasi internasional meningkat dibandingkan tahun 2024.
4. Analisis Program dan kegiatan terkait:
   KPM melakukan pendampingan terhadap 12 program studi S1 untuk mempersiapkan diri mengikuti akreditasi internasional ACQUIN.
5. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan/kegagalan:
   Kerjasama dengan ACQUIN masih belum optimal, respon dari ACQUIN lambat sehingga menimbulkan ketidakpastian. Sampai akhir tahun 2025 kontrak kerjasama masih belum direspon oleh pihak ACQUIN.
6. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja tahun 2025:
   Kerjasama dengan ACQUIN masih belum optimal, respon dari ACQUIN lambat sehingga menimbulkan ketidakpastian. Sampai akhir tahun 2025 kontrak kerjasama masih belum direspon oleh pihak ACQUIN.
7. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan:
   KPM secara berkala menghubungi pihak ACQUIN melalui email menanyakan kontrak pelaksanaan akreditasi internasional.
8. Analisis terkait strategi yang dilakukan:
   Secara berkala menghubungi pihak ACQUIN melalui email menanyakan kontrak pelaksanaan akreditasi internasional serta meminta bantuan konsultas UNNES untuk membantu menghubungi pohak ACQUIN.
9. Analisis keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja tahun 2025:
   Secara umum, sasaran 8 belum dapat menghasilkan hasil yang optimal, khususnya terkait dengan internasionalisasi UNNES. Masih terdapat hambatan dari prodi untuk bisa melakukan akreditasi internasional, yang khususnya disebabkan oleh repon yang lambat dari pihak ACQUIN. KPM sudah berusaha secara berkala menghubungi pihak ACQUIn, baik secara langsung maupun tidak langsung dan harapannya tahun depan pelaksanaan akreditasi internasional di UNNES dapat terlaksana.

Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Akademik Berorientasi Link and Match

IKKS 4.3.1. Indeks kepuasan pengguna lulusan
IKKS 4.3.2. Indeks kepuasan lulusan

1. Definisi operasional :
   IKKS 4.3.1. Indeks kepuasan pengguna lulusan adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan pengguna lulusan (seperti instansi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, sekolah, lembaga non-profit, atau wirausaha) terhadap kinerja, kompetensi, etika, dan profesionalisme lulusan perguruan tinggi, yang diperoleh melalui hasil survei terstruktur dan dinyatakan dalam bentuk nilai indeks sebagai cerminan kesesuaian capaian pembelajaran lulusan dengan kebutuhan dan harapan pengguna.

   IKKS 4.3.2. Indeks kepuasan lulusan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kepuasan lulusan terhadap pengalaman pendidikan dan layanan perguruan tinggi yang telah mereka terima, yang dihasilkan melalui survei lulusan (tracer study atau survei kepuasan) dan dinyatakan dalam bentuk nilai indeks sebagai indikator mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2. Cara perhitungan Indikator Kinerja : IKKS 4.3.1. Indeks kepuasan pengguna lulusan
   Penguna lulusan diminta untuk memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan dengan lima pilihan jawaban: Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, Sangat Kurang. Dari jawaban responden kemudian dibuat menjadi skala 4 dan dibuat nilai rata-ratanya.
   IKKS 4.3.2. Indeks kepuasan lulusan, lulusan diminta untuk memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan dengan lima pilihan jawaban: Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, Sangat Kurang. Dari jawaban responden kemudian dibuat menjadi skala 4 dan dibuat nilai rata-ratanya
3. Trend capaian kinerja
   Terjadi perbedaan cara penghitungan indeks kepuasan pengguna lulusan dan indeks kepuasan lulusan pada tahun 2025. Pada tahun 2025 ini menggunakan skala 4 dibandingkan dengan tahun 2024 yang menggunakan skala 5. Sehingga jika dilihat hasilnya, kedua indeks ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian, jika dilihat dari kedua hasil tersebut yang mendekati angka maksimal 4 maka dapat disimpulkan pengguna lulusan dan lulusan memiliki kepuasan yang tinggi.
4. Analisis Program dan kegiatan terkait
   Tidak terdapat program dan aktivitas kegiatan yang dilakukan KPM untuk meningkatkan angka indeks kepuasan pengguna lulusan dan indeks kepuasan lulusan. Tingginya tingkat indeks kepuasan pengguna lulusan dan indeks kepuasan lulusan disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan leh Fakultas dan Prodi.
5. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan: ingginya Indeks Kepuasan Pengguna Lulusan dan Indeks Kepuasan Lulusan merupakan hasil dari sinergi antara kurikulum yang relevan, proses pembelajaran bermutu, kualitas dosen, penguatan karakter, layanan yang baik, serta tata kelola dan budaya mutu yang berkelanjutan. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas sistem pendidikan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing.
6. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja tahun 2025
   Tidak ada hambatan
7. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan:
   Tidak ada langkah antisipasi yang dilakukan
8. Analisis terkait strategi yang dilakukan
   Strategi peningkatan Indeks Kepuasan Pengguna Lulusan dan Indeks Kepuasan Lulusan harus dilaksanakan secara holistik, mengintegrasikan aspek akademik, layanan, dan tata kelola, serta didukung oleh evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang unggul, relevan, dan berdaya saing.
9. Analisis keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja tahun 2025: Sasaran 4 tidak menunjukkan hasil target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena ada perbedaan cara penghitungan indeks kepuasan pengguna lulusan dan indeks kepuasan lulusan pada tahun 2025. Pada tahun 2025 ini menggunakan skala 4 dibandingkan dengan tahun 2024 yang menggunakan skala 5. Namun demikian, jika dilihat dari kedua hasil tersebut yang mendekati angka maksimal 4 maka dapat disimpulkan pengguna lulusan dan lulusan memiliki kepuasan yang tinggi.

B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran Kantor Penjaminan Mutu dalam DIPA tahun 2025 sebesar Rp.390.513.000,-. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp.356.994.026,- dengan persentase daya serap sebesar 91.42%.

Kode Anggaran	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
II.A.AC.02.i.b.001.KPM.2025.05.51020101 Monev Pedoman Pembelajaran Kelas Reguler dan Khusus Beban Honorarium Non Pegawai	13.250.000	13.200.000	99,62	50.000	0,38
II.A.AC.02.i.b.001.KPM.2025.05.51030102 Monev Pedoman Pembelajaran Kelas Reguler dan Khusus Beban Barang Habis Pakai Kegiatan - Konsumsi	68.500.000	66.983.000	97,79	1.517.000	2,21
II.A.AC.02.i.b.001.KPM.2025.05.51030105 Monev Pedoman Pembelajaran Kelas Reguler dan Khusus Beban Barang Habis Pakai Kegiatan - Lainnya	18.000.000	15.017.500	83,43	2.982.500	16,57
II.A.AC.02.i.b.001.KPM.2025.05.51030210 Monev Pedoman Pembelajaran Kelas Reguler dan Khusus Beban Penggandaan dan percetakan	5.813.000	4.931.250	84,83	881.750	15,17
II.A.AC.02.i.b.001.KPM.2025.05.51030211 Monev Pedoman Pembelajaran Kelas Reguler dan Khusus Beban Jasa Konsultan/ Profesi	100.000.000	100.000.000	100,00	-	0,00
II.A.AC.02.i.b.001.KPM.2025.05.51030215 Monev Pedoman Pembelajaran Kelas Reguler dan Khusus Beban Jasa Lainnya	170.750.000	142.813.750	83,64	27.936.250	16,36
II.A.AC.02.i.b.001.KPM.2025.05.51030402 Monev Pedoman Pembelajaran Kelas Reguler dan Khusus Beban Yang Digunakan oleh Unit Kerja Lain di UNNES	5.800.000	5.668.100	97,73	131.900	2,27
II.A.AC.02.i.b.001.KPM.2025.05.51040102 Monev Pedoman Pembelajaran Kelas Reguler dan Khusus Beban Perjalanan Dinas - Dalam Negeri	8.400.000	8.380.426	99,77	19.574	0,23
TOTAL Kantor Penjamin Mutu	**390.513.000**	**356.994.026**	**91,42**	**33.518.974**	**8,58**

2. Realisasi Anggaran dan Pendukung Indikator Kinerja

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 3 sasaran dengan 9 indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-

masing sasaran/indikator kinerja.

Tabel 6 - Realisasi anggaran per program Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran							
		IKU 3.2. Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	%	95.2	96.97	39.051.300	35.699.403	91.42
		IKKU 3.2.2. Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	%	95.2	96.97	39.051.300	35.699.403	91.42
2	Sasaran 8. Terwujudnya World Class University							
		IKS.8.1 Jumlah Prodi yang Terakreditasi A dan/atau unggul	Prodi	84	84	39.051.300	35.699.403	91.42
		IKKS 8.1.5. Jumlah Prodi yang mengimplementasikan kurikulum dual degreee	Prodi/ Unit	10	10	39.051.300	35.699.403	91.42
		IKKS 8.1.6. Jumlah Prodi Internasional (yang punya kelas internasional)	Prodi/ Unit	29	22	78.102.600	71.398.805	91.42
		IKU 3.3. Persentase Prodi S1/D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	41	32	39.051.300	35.699.403	91.42
		IKKU 3.3.1. Jumlah Program Studi S1 dan D3 yang memiliki akreditasi	Prodi	29	24	39.051.300	35.699.403	91.42

		internasional						
3	Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Akademik Berorientasi Link and Match							
		IKS 4.3.kepuasan lulusan dan pengguna lulusan	Indeks	-	-			
		IKKS 4.3.1. Indeks kepuasan pengguna lulusan	Indeks	4.6	3.69	39.051.300	35.699.403	91.42
		IKKS 4.3.2. Indeks kepuasan lulusan	Indeks	4.52	3.40	39.051.300	35.699.403	91.42

3. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2025, Kantor Penjaminan Mutu berhasil melakukan semua kegiatan yang telah di rencanakan di awal tahun sesuai dengan Pagu yang telah diberikan. Dan tahun 2025 Pagu Kantor Penjaminan Mutu sudah di pangkas dari yang awal nya Rp.125.000.000 menjadi Rp.106.250.000.dimana pemangkasan ini dilakukan di awal awal tahun yaitu sekitar awal Bulan Februari 2025. Adapun kebutuhan anggaran untuk kegiatan non Rutin, Kantor Penjaminan mutu mengajukan penambahan Pagu kembali ke Pimpinan Universitas, antara lain untuk kegiatan : Rapat Tinjauan Manajemen, dan Pendampingan Akreditasi Internasional ACQUIN.

C. Kinerja Lain lain

1. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada KPM adalah bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan layanan publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses layanan. Adapun langkah-langkah kerja yang telah dilakukan pada KPM dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai berikut:

a) Menyiapkan aplikasi SIAP (Sistem Informasi Akeditasi Prodi) yang akan memudahkan Prodi dalam mempesiapkan akreditasi
b) Menyempurnakan aplikasi SIAMI (Sistem Informasi Audit Mutu Internal) berupa tambahan fitur tindak lanjut, di mana UPPS, Prodi dan Unit Pendukung diwajibkan untuk mengisi tindak lanjut dari hasil yang tidak maksimal yang didapatkan dari hasil

AMI tahun lalu.

Melalui upaya ini, diharapkan agar birokrasi lebih efisien, berintegritas, dan mampu mendukung program-program pendidikan yang berdampak luas bagi masyarakat.

2. Inovasi

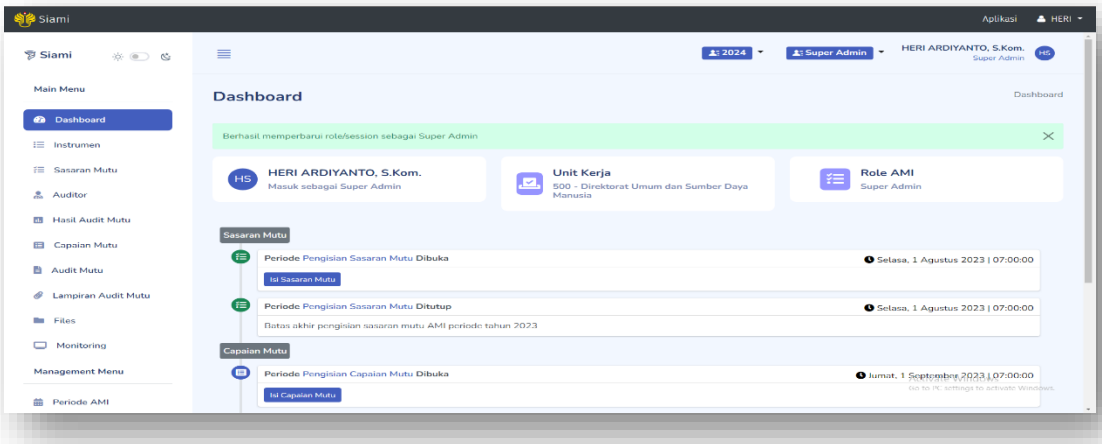
Pada tahun 2025, KPM melakukan inovasi :

Sistem Audit Mutu Internal (SIAMI)

Dalam mendukung peningkatan reputasi UNNES serta mengikuti tuntutan perkembangan zaman yang saat ini tidak dapat terlepas dari peran teknologi informasi, Kantor Penjaminan Mutu berinisiatif untuk terus mengembangkan Sistem Audit Mutu Internal (SIAMI) yang sudah dikembangkan pada tahun sebelumnya. Inovasi yang muncul dari kebutuhan akreditasi Prodi mengenai indeks kepuasan layanan yang diberikan UNNES memberikan dampak positif bagi civitas internal UNNES, bahkan ada perguruan tinggi mitra yang menyambut baik adanya SIAMI dan mengajukan untuk mengadopsi sistem tersebut.

Sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah, SIAMI merupakan sistem yang dirancang untuk mendukung kegiatan Audit Mutu Internal (AMI). Melalui sistem ini kegiatan audit dapat lebih efektif karena auditor dapat lebih fokus pada kegiatan audit dan admin pusat dapat dengan mudah dalam mengelola data hasil audit.

Gambar 2 – Sistem Audit Mutu Internal (SIAMI)



Sistem yang sudah dikembangkan sejak tahun 2014 tersebut telah mengalami beberapa kali pembaruan mengikuti perkembangan kebijakan institusi. SIAMI versi terbaru terdiri dari 3 level pengguna, yaitu level auditor, level auditee, dan level operator yang dikelola oleh Kantor

Penjaminan Mutu. Data yang sudah terekam dapat langsung direpresentasikan ke dalam informasi berbentuk grafik dan tulisan, sehingga dapat dengan mudah dalam menganalisa. Dalam rangka meningkatkan kualitas akademik, kedepan akan dikembangkan dengan lebih baik lagi menyesuaikan kebutuhan institusi.

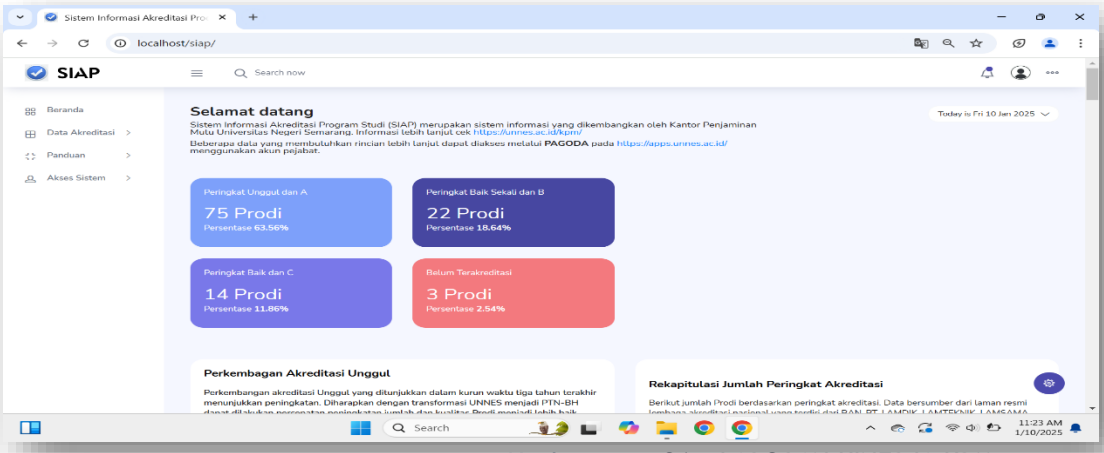
Sesuai dengan PPEPP, maka prodi wajib untuk melakukan tindak lanjut dari hasil AMI agar terjadi keberlanjutan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal. Sehingga pada tahun 2025, SIAMI diberi tambahan fitur tindak lanjut, di mana UPPS, Prodi dan Unit Pendukung diwajibkan untuk mengisi tindak lanjut dari hasil yang tidak maksimal yang didapat berdasarkan hasil AMI tahun lalu.

Sistem Akreditasi Prodi (SIAP)

Dalam mendukung peningkatan reputasi UNNES serta mengikuti tuntutan perkembangan zaman yang saat ini tidak dapat terlepas dari peran teknologi informasi, Kantor Penjaminan Mutu berinisiatif mengembangkan Sistem Akreditasi Prodi (SIAP), disamping Sistem Kepuasan Layanan (SIKEPUS) dan Sistem Audit Mutu Internal (SIAMI) yang sudah dikembangkan pada tahun sebelumnya. Inovasi yang muncul dari kebutuhan akreditasi Prodi UNNES dalam melakukan monitoring masa berlaku akreditasi.

Sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini, SIAP merupakan sistem yang dirancang untuk mendukung kegiatan akreditasi Prodi. Melalui sistem ini Prodi dapat melakukan monitoring dan mendapat notifikasi apabila akan dan telah memasuki masa berakhir akreditasi. SIAP dapat diakses melalui URL https://kpm-apps.unnes.ac.id/. Pada tahun 2025, SIAP diberi tambahan fitur terkait early warning system untuk mengetahui memberitahu ataun mengingatkan prodi terkait dengan masa berlaku akreditasi prodi.

Gambar 3 – Sistem Akreditasi Prodi (SIAP)



3. Penghargaan

   Pada tahun 2025, KPM tidak mendapatkan penghargaan apapun.

4. Program Crosscutting/Collaborative

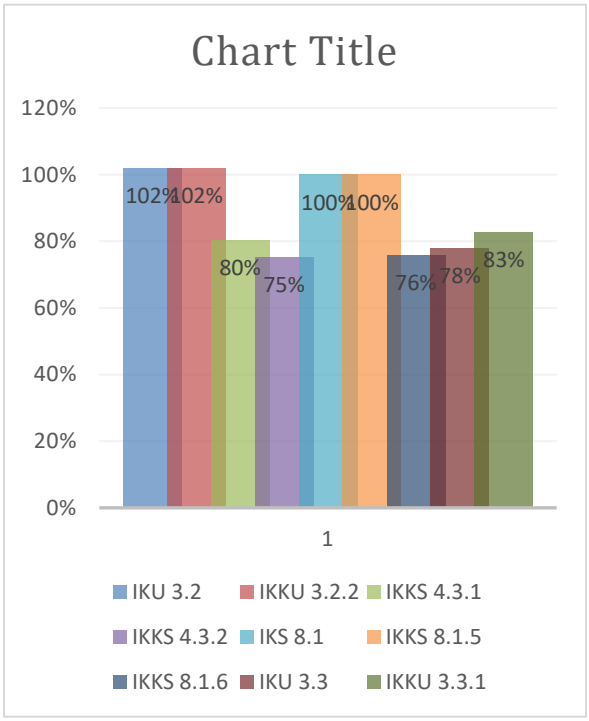
   Pada tahun 2025, KPM melakukan program crosscutting/collaborative melalui program bantuan Program Studi Terbina Sistem Penjaminan mutu Internal Tahun 2024 yang berasal dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Hibah ini berupa pendampingan terhadap perguruan tinggi swasta dalam pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Adapun perguruan tinggi swasta yang ditunjuk sebagai perguruan tinggi terbina UNNES, yaitu:

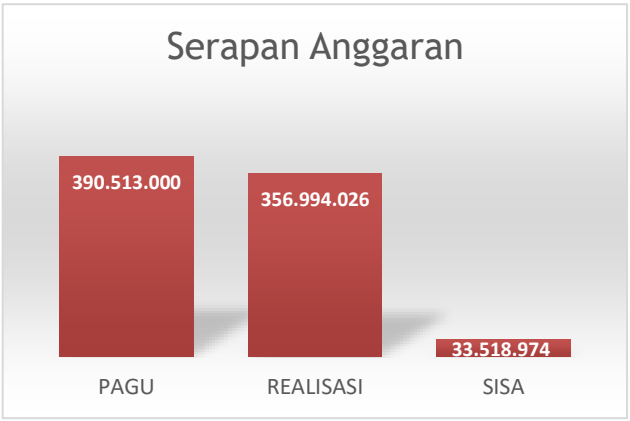
   1) Universitas Sragen
   2) Universitas muhammadiyah Tegal
   3) STIE Wijaya Mulya Surakarta
   4) STT Pati
   5) ITS NU Pekalongan

BAB IV
Penutup

A. Ringkasan Kinerja

Selama tahun 2025, KPM telah melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.







1. Target Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi telah tercapai
2. Target Jumlah Prodi yang Terakreditasi A dan/atau unggul telah tercapai
3. Target Jumlah Prodi yang mengimplementasikan kurikulum dual degree sudah tercapai
4. Target Jumlah Prodi Internasional (yang punya kelas internasional) belum tercapai
5. Target Persentase Prodi S1/D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah belum tercapai
6. Target Jumlah Program Studi S1 dan D3 yang memiliki akreditasi internasional belum tercapai
7. Target Indeks kepuasan pengguna lulusan sudah tercapai

8. Target Indeks kepuasan lulusan sudah tercapai
9. Target Keluaran untuk Jumlah kegiatan yang telah di target kan telah tercapai
10. Serapan Anggaran Kantor Penjaminan Mutu di Tahun 2025 sebesar 91.42%.

Sebagai Upaya meningkatkan capaian kinerja, beberapa inovasi yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Penyempurnaan SIAMI
2. Penyempurnaan SIAP

B. Permasalahan

Dari hasil evaluasi kinerja, hal yang perlu mendapat perhatian antara lain Perlu upaya-upaya lebih lanjut dalam pelaksanaan akreditasi internasional melalui ACQUIN.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2026

Arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja tahun pada tahun 2026 adalah :

1. Meningkatkan jumlah prodi yang terakreditasi unggul melalui strategi monitoring yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan prodi-prodi sudah mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi akreditasi
2. Meningkatkan jumlah prodi yang memiliki dual degree melalui strategi penetapan prodi-prodi tertentu yang dtunjuk untuk mengembangkan kerjasama dual degree serta melakukan monitoring terhadap prodi-prodi terpilih tersebut
3. Melaksanakan akreditasi internasional melalui ACQUIN dengan strategi memastikan prodi-prosdi sudah siap melaksanakan akreditasi internasioal ACQUIN.

Lampiran
1. Perjanjian Kinerja Awal dan Perjanjian Kinerja Revisi Terakhir
2. Pengukuran Kinerja